

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang dianut oleh berbagai negara di seluruh dunia. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “*demos*” yang memiliki arti penduduk atau rakyat dan “*cratos*” yang berarti kedaulatan ataupun kekuasaan. Secara bahasa demokrasi (*demos-cratos*) adalah sistem politik dalam suatu negara yang bermakna bahwa kedaulatan pemerintah berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat (Heywood, 2014). Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi identik dengan kekuasaan rakyat (government by the people), artinya rakyat berhak untuk terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan di suatu negara (Budiardjo, 2013).

Negara demokrasi ditandai dengan adanya suatu partai politik yang merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam negara demokrasi, partai politik berada dan beroperasi dalam suatu sistem kepartaian tertentu. Sistem kepartaian dikemukakan pertama kali oleh *Maurice Duverger* dalam bukunya *Political Parties*, yang menjelaskan bahwa sistem kepartaian adalah analisis untuk meneliti tata cara partai-partai politik berinteraksi satu sama lain sebagai bagian dari suatu sistem (Budiardjo, 2013).

Pada era reformasi, partai politik cenderung mengalami konflik internal. Konflik internal umumnya disebabkan oleh faktor pilihan oposisi dan koalisi. Partai-partai politik yang terlibat dalam konflik internal, sebagian kecenderungan memunculkan perpecahan yang berujung pada lahirnya kepengurusan ganda dan sebagian lagi melahirkan partai-partai baru. Kohesivitas dan soliditas dianggap lemah akibat kerap kali munculnya konflik internal dalam partai politik. Konflik internal partai-partai politik juga menandakan betapa minimnya pelembagaan di tubuh partai dalam mengatasi konflik untuk menuju konsensus. Muncul kecenderungan konflik internal bukan disebabkan perbedaan platform, ideologi partai maupun visi-misi, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden atau pemerintahan serta kepentingan kekuasaan.

Untuk menjaga soliditas partai dari ancaman perpecahan, faktor ideologi saja ternyata tidak cukup. Partai politik dengan latar belakang ideologi, hampir semua mengalami adanya perpecahan, terlihat dari tidak hanya partai islam namun juga partai sekuler seperti (komunis, sosialis, nasionalis). Sehingga, perlu ditemukan faktor dan upaya yang menyebabkan runtuhnya soliditas partai, tentunya hal ini dilakukan agar menjadi pembelajaran maupun evaluasi kedepannya dalam mengelola dan mengatur partai politik menjadi lebih baik. Hal ini pula dilakukan agar menjadi barometer bagi publik dalam melihat kualitas dan kapasitas partai politik dalam mengelola kelembagaannya sebagai miniature kecil dari sistem politik bernegara. Menyikapi hal tersebut perpecahan partai politik tidak terlepas

dengan peranan partai islam yakni partai keadilan sejahteran (PKS) yang dianggap mempunyai soliditas yang baik sejak sepuluh tahun terakhir.

Dalam perjalanannya PKS kemudian mengalami dinamika internal terkait kebijakan partai yang bermetamorfosis menjadi lebih terbuka. Kebijakan ini diambil PKS pasca MUNAS 1 di Bali. Perubahan sikap PKS ini membuat partai dicitrakan tidak konsisten dengan sikap awal perjuangan partai dan di sisi lain dipandang hanyalah kepura-puraan untuk mencari simpati yang lebih luas dari publik. Sementara itu di internal partai juga terjadi dinamika dan perbedaan pendapat atas sikap PKS ini. Di satu sisi kalangan ideologi lebih cenderung menginginkan agar PKS tetap pada julur awal perjuangan dan cita-cita partai, namun di sisi lain kalangan muda berfikir lebih pragmatis dan taktis agar PKS bisa memperluas basis dan dukungannya untuk menjadi partai besar di masa depan. Perbedaan pendapat ini jika tidak dikelola dengan baik akan membawa partai ini ke arah perpecahan. Namun sejauh ini perbedaan ini masih bisa di kelola dan menghindarkan partai dari perpecahan.

Suatu hal yang tak bisa dipungkiri lagi, jika hari-hari ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kian mengalami problema politik yang sangat dilematis. Sejak ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaq menjadi tersangka kasus suap peningkatan kuota sapi impor oleh KPK telah menyebabkan penurunan tersendiri bagi elektoral partai. Tragedi yang telah menimpa PKS saat ini seakan menjadi penanda dua indikasi tertentu, yaitu rapuhnya perjuangan politik dakwah dalam memperbaiki umat melalui partai politik dan intensitas pertarungan politik praktis yang

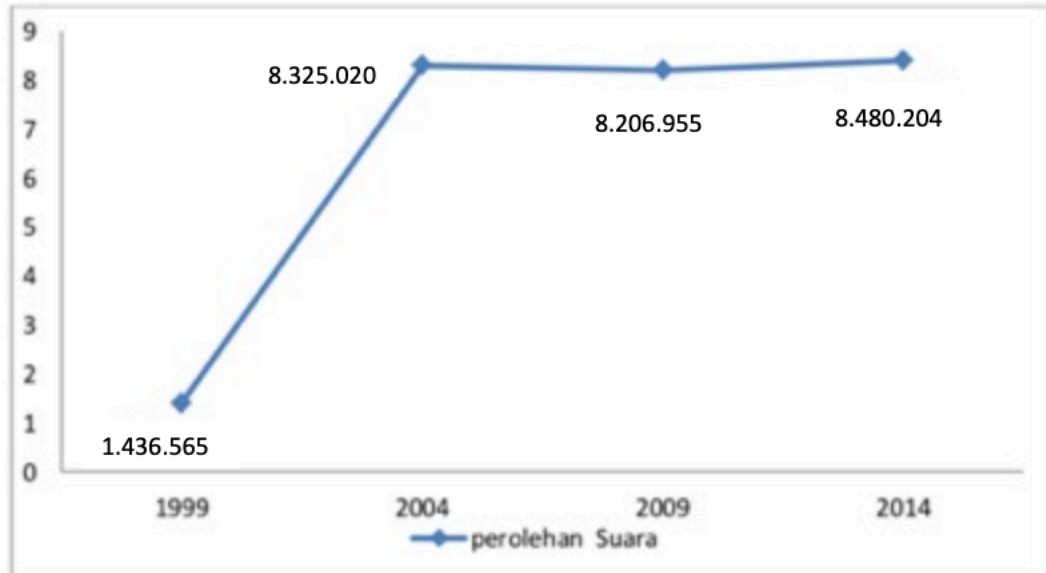
mengedepankan kepentingan partai lebih dominan ketimbang memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Keberhasilan PKS dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan perolehan suaranya dalam setiap kali pemilu di tengah tingginya gejala *electoral volatility* yang dialami hampir semua partai politik merupakan sebuah kajian yang cukup menarik. Keberhasilan PKS ini semakin menarik lagi ketika dalam perjalanannya PKS juga mengalami momen-momen kritis sepanjang keikutsertaannya dalam pemilu. Persoalan tersebut tidak memberi dampak yang serius terhadap performa partai seperti halnya yang dialami oleh beberapa partai lainnya yang merasakan dampak negatif terhadap perolehan suaranya, namun PKS justru mengalami kecenderungan peningkatan perolehan suara di setiap pemilu. Di tengah masalah yang dihadapi PKS ini, hasil pemilu menunjukkan penurunan persentase perolehan suara dan perolehan kursi yang diperoleh PKS ternyata berkorelasi negatif dengan pertumbuhan perolehan suaranya secara nasional. Pada pemilu 2009 PKS memperoleh suara secara nasional sebesar 8.206.955 dan justru mengalami peningkatan menjadi 8.480.204 di tahun 2014. Angka ini menunjukkan bahwa PKS mampu bertahan di tengah persoalan politik yang dihadapinya dan tetap eksis di tengah ketatnya persaingan politik nasional.

Sepanjang keikutsertaannya dalam pemilu tren positif ditunjukkan oleh PKS, dimana tren perolehan suaranya cenderung stabil bahkan terus mengalami pertumbuhan. Sebagai sebuah organisasi tentu PKS tidak terlepas dari berbagai persoalan dan dinamika yang mengharuskan partai bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya. PKS membuktikan

kepiawaiannya dalam melakukan kontrol dan manajemen organisasi. Dengan gerak cepat PKS melakukan pergantian pimpinan partai dan melakukan konsolidasi secara internal untuk meminimalisir dampak buruk kasus yang dialami kadernya terhadap partai. Dengan usaha dan kerja keras struktur dan kader PKS, partai ini berhasil membuktikan kepada publik bahwa PKS masih mampu bertahan dan tetap eksis di panggung politik nasional dengan capaian suara yang tidak begitu mengecewakan pada pemilu 2014. Di tengah persoalan yang menghantam partai ini dan sentimen negatif publik PKS masih mampu mempertahankan basis dukungannya dengan perolehan suara 6.79% dan menempatkan kadernya sebanyak 40 orang sebagai wakil rakyat.

Gambar 1.2
Pertumbuhan Perolehan Suara PKS



Sumber: Diolah dari data KPU

Firman Noor (2015), dalam bukunya perpecehan dan soliditas partai islam, PKS merupakan partai politik yang mampu menjaga soliditas partainya. Meskipun terdapat beberapa konflik internal namun tidak sampai berpengaruh

terhadap soliditas partai hingga perbedaan pendapat yang mampu membuat kondisi kohesivitas dan soliditas partai menjadi tidak kondusif. Setiap pergantian kepemimpinan partai, selalu mulus tanpa hambatan, bahkan pemimpin maupun president partai akan mundur dari jabatannya saat diangkat menjadi Menteri maupun pimpinan lembaga negara. Terdapat beberapa kasus pemecatan terhadap kader utamanya kader senior yang memegang pengaruh penting dalam tubuh partai. Seperti Syamsul Balda yang pernah menjabat sebagai wakil president PPKS dan sebagai anggota majelis syuro, kemudian ada Yusuf Supendi wakil ketua dewan Syariah PKS dan anggota majelis syuro. Dari sekian banyaknya kasus pemecatan namun tidak sampai melahirkan oposisi dalam internal partai, apalagi melahirkan partai baru. Konflik yang disebabkan pemecatan kader partai yang tidak selesai pada internal partai dan berlanjut pada pengadilan sebagai alur diluar partai yaitu kasus Yusuf Supendi dan kasus yang menimpa Fahri Hamzah yang coba di rotasi dari posisinya sebagai wakil ketua DPR RI.

Firman Noor (2015). Studi ini pada dasarnya sebuah studi perbandingan pelembagaan partai politik Islam khususnya antara PKB dan PKS. Dalam dekade pertama Era Reformasi, PKB telah menjadi contoh sebagai salah satu partai yang ter-fragmentasi, partai ini mengalami perpecahan sampai tiga kali. Sementara itu, PKS telah mampu mempertahankan disiplin dan kesatuan internal. PKS, setidaknya sampai saat ini, adalah satu-satunya partai Islam utama yang mampu menghindari perpecahan meskipun dalam sepuluh tahun pertama, faksionalisme dan fragmentasi telah menjadi hal yang biasa dialami oleh banyak partai politik terutama dalam politik kontemporer Indonesia. PKS telah berhasil mengelola perbedaan internal,

perbedaan pendapat dan aspirasi serta berhasil mengonsolidasikan partai. Hal senada diungkapkan oleh Hamayotsu (2011) dimana disiplin partai yang tinggi telah membawa PKS pada pengorganisasian partai yang baik serta terhindar dari ancaman faksionalisasi dan perpecahan yang telah menjadi gejala umum partai politik di Indonesia. PKS telah berhasil merancang mesin partai dengan pelembagaan yang kuat sehingga berhasil menekan munculnya perpecahan di dalam partai sehingga memungkinkan partai untuk terus melakukan ekspansi dan bertahan hidup dalam kompetisi yang semakin kompetitif.

Namun setelah kemenangan Pemilu 2004 perbedaan pandangan terjadi di partai PKS yang saat itu dijabat oleh Anis Matta selaku sekretaris jenderal PKS dan Hilmi Aminuddin yang saat itu sebagai ketua majelis syuro PKS. Pengelolaan partai yang dianggap menjadi tertutup khususnya sumber daya partai. Anis matta yang saat itu menjabat sebagai sekjen tidak setuju atas pengelolaan partai seperti itu. Anis Matta ingin menjadikan partai keadilan sejahtera (PKS) menjadi partai yang terbuka dan dapat menyesuaikan diri pada model negara demokrasi, utamanya dalam pengelolaan sumber daya partai maupun model pengkaderan yang lebih terbuka. Dan perbedaan itu terus berlangsung selama sepuluh tahun PKS menjadi bagian dari pemerintah.

Konflik yang terus terjadi di internal PKS membuat keluarnya tokoh-tokoh hingga membentuk forum diluar dari internal partai yaitu forum kader peduli (FKP). Namun eksistensi FKP tidak sampai membuat soliditas partai menjadi terbelah, hingga hanya dianggap sebagai otokritik dari bagian partai politik. Kabar terakhir, tokoh-tokoh FKP justru kembali mendukung PKS di perodesasi

kepemimpinan Sohibul Iman. Perbedaan pendapat juga terjadi pada dukungan dalam menentukan arah koalisi maupun calon president dapat dikelola dan diatur dengan baik sehingga tidak terjadinya perpecahan di internal partai. Walau dari pengamatan beberapa pengamat, terdapat faksi-faksi dalam internal PKS yaitu faksi keadilan dan faksi sejahtera. Faksi keadilan berorientasi pada dakwah dan faksi sejahtera lebih berorientasi pada politik. Namun dari tuduhan tersebut, beberapa kali dibantah oleh internal PKS mengenai munculnya faksi-faksi dalam internal partai PKS. Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam tubuh PKS tidak sampai membuat pengelompokan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini hanya dianggap sebagai pandangan yang sifatnya temporal dan fleksibel tergantung pada isu yang berkembang sehingga tidak membuat goyahnya soliditas partai.

Menjelang pesta demokrasi di tahun 2019, faksi tersebut mencuat ke publik, yakni faksi keadilan dan faksi sejahtera. Gerbong yang disebutkan sebagai faksi sejahtera merupakan Anis Matta (president PKS 2013-2015), Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq dan para pengikutnya, sedangkan faksi keadilan diisi oleh para tokoh pimpinan pusat yang menjabat saat ini, yakni Sohibul Iman (Presiden PKS), Aminuddin (mantan Ketua Majelis Syuro) dan Segaf Al-Jufri (Ketua Majelis Syuro sekarang) dan bersama para pengikutnya. Fenomena konflik yang terjadi semakin melebar dengan Sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mundur sebagai calon legislatif Pemilu 2019, muncul dugaan pembersihan pengikut Anis Matta. Dari berbagai konflik dan fraksi yang ada lahirlah sebuah ide tentang arah baru Indonesia (ABI) yang sudah didiskusikan sejak pemilu 2014 ketika Anis Matta masih menjabat sebagai Presiden PKS. Sejumlah pejabat teras PKS yang saat itu

terlibat dalam pembentukan gagasan ABI, di antaranya Anis Matta, Mahfuz, Fahri Hamzah, Jazuli Juwaini, Sukamta, almarhum Taufik Ridlo, dan Mahfudz Abdurrahman. Dalam perjalanannya, arah baru Indonesia dimusuhi para pimpinan PKS era Sohibul Iman. Gagasan tersebut dituding sebagai gerakan mengkudeta PKS, sehingga tidak sedikit pengurus di daerah yang dicopot karena mengikuti diskusi ABI. Setelah diskusi gagasan yang panjang mengenai arah baru Indonesia (ABI) berlanjut dibentuknya sebuah gerakan yang sampai saat ini sudah di deklarasikan diberbagai kota yaitu gerakan arah baru Indonesia (GARBI).

Garbi merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengajak masyarakat luas dengan cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, menjadi kekuatan lima besar dunia. Garbi ini sudah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Pertama kali, dideklarasikan di Makassar Sulawesi selatan, kehadiran Garbi tak lepas dari sosok mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta. Gerakan Arah Baru Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat yang berkontribusi mewadahi ide dan gagasan anak bangsa yang ikut berperan aktif dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia dengan mengedepankan model demografi Indonesia yang sedang menyongsong bonus demografi, dimana jumlah generasi muda produktif akan melimpah, berpotensi mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi asia yang menyaingi RRC dan dapat diperhitungkan dunia. Sebagian gambaran tersebut adalah potensi yang akan dicapai Indonesia jika bangsa ini mempunya arah yang jelas dan kepemimpinan yang tegas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mencoba mendalami kasus di atas dengan meneliti secara lebih mendalam yang bermula dari konflik internal

PKS, kemudian tidak diusungnya Anis Matta sebagai calon president dalam internal partai PKS, tidak mencalonkannya Fahri Hamzah kembali dalam kontes politik sebagai calon anggota legislatif dan munculnya sebuah gerakan arah baru Indonesia (GARBI) merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, sehingga penulisan tesis berjudul ***“Motif Politik Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI)”***

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana motif politik dalam kelahiran dan pembentukan gerakan arah baru Indonesia (GARBI)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana motif politik kelahiran dan pembentukan yang terjadi sehingga gerakan arah baru Indonesia bisa muncul di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi tentang politik pemerintahan dan politik legislasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.